



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJI
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 669950

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.000.000

1. MOTOR, KYMCO TREND MOVIE Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOTOR, KYMCO KA22SA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
4. MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.000.002

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 627.000.002

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 607.000.002

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.